



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

---

Nomor : CV 26-30/V 65-7/99

Jakarta, 16 Mei 2018

Perihal : Penetapan Kelulusan Peserta Uji  
Kompetensi Jabatan Fungsional  
Kepegawaian

Kepada Yth :

1. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian/Lembaga;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota.

di

Tempat

1. Berdasarkan hasil koordinasi kami dengan Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Kedeputian Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maka untuk penetapan kelulusan peserta hasil uji kompetensi Jabatan Fungsional Kepegawaian (Analisis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur) didasarkan pada penetapan formasi Jabatan Fungsional Kepegawaian.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, kami harapkan agar Instansi melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut ini :
  - a. Mengisi data kebutuhan formasi untuk Jabatan Fungsional Kepegawaian ke dalam aplikasi e-formasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - b. Mengajukan usul penetapan formasi secara tertulis dan dikirimkan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Kepegawaian di lingkungan Instansi masing-masing serta melampirkan hasil cetak pengisian aplikasi e-formasi yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi.
3. Mengacu pada angka 2 (dua) huruf a dan angka 2 (dua) huruf b, maka Badan Kepegawaian Negara akan memberikan sertifikat kelulusan peserta uji kompetensi setelah Instansi mendapatkan penetapan formasi Jabatan Fungsional Kepegawaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4. Penetapan formasi Jabatan Fungsional Kepegawaian sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 (tiga), dapat kami terima selambat-lambatnya 30 Juni 2018.

5. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala  
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian



Drs. Margi Prayitno, M.AP  
NIP. 19641207198503100

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai laporan;
2. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi; dan
3. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian.

DAFTAR NAMA INSTANSI PESERTA UJI KOMPETENSI  
UJI KOMPETENSI INPASSING JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN

NO	INSTANSI
1	ANRI
2	Badan Informasi Geospasial
3	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
4	Badan Pertanahan Nasional
5	Badan Pusat Statistik (BPS)
6	Badan Standarisasi Nasional
7	BASARNAS
8	BATAN
9	BKKBN
10	BMKG
11	BNN
12	BNP2TKI
13	BNPT
14	BPKP
15	BPPT
16	Kementerian Agama
17	Kementerian Dalam Negeri
18	Kementerian ESDM
19	Kementerian Hukum dan HAM
20	Kementerian Kelautan dan Perikanan
21	Kementerian Kesehatan
22	Kementerian Ketenagakerjaan
23	Kementerian Keuangan
24	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)
25	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
26	Kementerian Luar Negeri
27	Kementerian Pariwisata
28	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
29	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
30	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
31	Kementerian Perdagangan
32	Kementerian Perhubungan
33	Kementerian Perindustrian
34	Kementerian Pertanian
35	Kementerian Pertahanan
36	Kementerian Polhukam
37	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	- Universitas Gajah Mada
	- Universitas Padjajaran
	- Politeknik Negeri Kupang
38	Kementerian Sekretariat Negara
39	Kementerian Sosial
40	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM)
41	LAN
42	LAPAN
43	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)
44	Lembaga Ketahanan Nasional

NO	INSTANSI
45	Lembaga Sandi Negara
46	Mahkamah Agung RI
47	Pemerintah Kabupaten Kotabaru
48	Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
49	Pemerintah Kabupaten Agam
50	Pemerintah Kabupaten Badung
51	Pemerintah Kabupaten Balangan
52	Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
53	Pemerintah Kabupaten Bangkalan
54	Pemerintah Kabupaten Bangka
55	Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
56	Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
57	Pemerintah Kabupaten Bangli
58	Pemerintah Kabupaten Bantul
59	Pemerintah Kabupaten Batang Hari
60	Pemerintah Kabupaten Bekasi
61	Pemerintah Kabupaten Belitung
62	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
63	Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
64	Pemerintah Kabupaten Bengkayang
65	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
66	Pemerintah Kabupaten Bintan
67	Pemerintah Kabupaten Blora
68	Pemerintah Kabupaten Bogor
69	Pemerintah Kabupaten Boyolali
70	Pemerintah Kabupaten Brebes
71	Pemerintah Kabupaten Cirebon
72	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
73	Pemerintah Kabupaten Garut
74	Pemerintah Kabupaten Gianyar
75	Pemerintah Kabupaten Grobogan
76	Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul
77	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
78	Pemerintah Kabupaten Jembrana
79	Pemerintah Kabupaten Kampar
80	Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
81	Pemerintah Kabupaten Karanganyar
82	Pemerintah Kabupaten Karangasem
83	Pemerintah Kabupaten Karo
84	Pemerintah Kabupaten Kepahiang
85	Pemerintah Kabupaten Klaten
86	Pemerintah Kabupaten Kudus
87	Pemerintah Kabupaten Kuningan
88	Pemerintah Kabupaten Kupang
89	Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara
90	Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
91	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
92	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
93	Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
94	Pemerintah Kabupaten Madiun

NO	INSTANSI
95	Pemerintah Kabupaten Magetan
96	Pemerintah Kabupaten Manggarai
97	Pemerintah Kabupaten Mempawah
98	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
99	Pemerintah Kabupaten Natuna
100	Pemerintah Kabupaten Ngada
101	Pemerintah Kabupaten Nganjuk
102	Pemerintah Kabupaten Ngawi
103	Pemerintah Kabupaten Pacitan
104	Pemerintah Kabupaten Pasaman
105	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
106	Pemerintah Kabupaten Paser
107	Pemerintah Kabupaten Pati
108	Pemerintah Kabupaten Pekalongan
109	Pemerintah Kabupaten Pematang
110	Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
111	Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
112	Pemerintah Kabupaten Pinrang
113	Pemerintah Kabupaten Purbalingga
114	Pemerintah Kabupaten Purwakarta
115	Pemerintah Kabupaten Purworejo
116	Pemerintah Kabupaten Rembang
117	Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
118	Pemerintah Kabupaten Sampang
119	Pemerintah Kabupaten Sarolangun
120	Pemerintah Kabupaten Semarang
121	Pemerintah Kabupaten Siak
122	Pemerintah Kabupaten Sijunjung
123	Pemerintah Kabupaten Situbondo
124	Pemerintah Kabupaten Sleman
125	Pemerintah Kabupaten Solok
126	Pemerintah Kabupaten Sragen
127	Pemerintah Kabupaten Sukabumi
128	Pemerintah Kabupaten Sumedang
129	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
130	Pemerintah Kabupaten Tangerang
131	Pemerintah Kabupaten Temanggung
132	Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
133	Pemerintah Kabupaten Trenggalek
134	Pemerintah Kabupaten Tulungagung
135	Pemerintah Kabupaten Wajo
136	Pemerintah Kabupaten Wonogiri
137	Pemerintah Kabupaten Wonosobo
138	Pemerintah Kota Balikpapan
139	Pemerintah Kota Bandung
140	Pemerintah Kota Banjarbaru
141	Pemerintah Kota Banjarmasin
142	Pemerintah Kota Batu
143	Pemerintah Kota Bekasi
144	Pemerintah Kota Bengkulu

NO	INSTANSI
145	Pemerintah Kota Blitar
146	Pemerintah Kota Bogor
147	Pemerintah Kota Bontang
148	Pemerintah Kota Bukittinggi
149	Pemerintah Kota Cimahi
150	Pemerintah Kota Cirebon
151	Pemerintah Kota Depok
152	Pemerintah Kota Dumai
153	Pemerintah Kota Lhokseumawe
154	Pemerintah Kota Lubuklinggau
155	Pemerintah Kota Madiun
156	Pemerintah Kota Magelang
157	Pemerintah Kota Makassar
158	Pemerintah Kota Malang
159	Pemerintah Kota Medan
160	Pemerintah Kota Pagar Alam
161	Pemerintah Kota Palopo
162	Pemerintah Kota Payakumbuh
163	Pemerintah Kota Pekanbaru
164	Pemerintah Kota Pematangsiantar
165	Pemerintah Kota Pontianak
166	Pemerintah Kota Probolinggo
167	Pemerintah Kota Salatiga
168	Pemerintah Kota Samarinda
169	Pemerintah Kota Sawahlunto
170	Pemerintah Kota Semarang
171	Pemerintah Kota Singkawang
172	Pemerintah Kota Surakarta
173	Pemerintah Kota Tangerang
174	Pemerintah Kota Tanjung Pinang
175	Pemerintah Kota Tarakan
176	Pemerintah Kota Tasikmalaya
177	Pemerintah Kota Tegal
178	Pemerintah Kota Yogyakarta
179	Pemerintah Provinsi Bali
180	Pemerintah Provinsi Banten
181	Pemerintah Provinsi Bengkulu
182	Pemerintah Provinsi DIY
183	Pemerintah Provinsi Jambi
184	Pemerintah Provinsi Jawa Barat
185	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
186	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
187	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
188	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
189	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
190	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
191	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
192	Pemerintah Provinsi Lampung
193	Pemerintah Provinsi Maluku Utara
194	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO	INSTANSI
195	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
196	Pemerintah Provinsi Papua
197	Pemerintah Provinsi Riau
198	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
199	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
200	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
201	PPATK
202	Sekretaris Jenderal DPR RI